



From Inequality to Digital Inclusion: Opportunities and Challenges of Digitalization among Santri in Indonesia

Dari Kesenjangan ke Inklusi Digital: Peluang dan Tantangan Digitalisasi di Kalangan Santri di Indonesia

Mustafa^{1*}, Rohayati², Assyari Abdullah³, Nur Alhidayatillah⁴, Dwi Puji Astuti⁵

^{1,2,3,4,5} Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

E-Mail: ¹mustafa@uin-suska.ac.id, ²rohayati@uin-suska.ac.id, ³assyariabdullah@uin-suska.ac.id, ⁴nuralhidayatillah@uin-suska.ac.id, ⁵dwisutriastuti87@gmail.com

Corresponding Author: Mustafa

Abstract

Islamic boarding schools are one of the educational institutions that are also affected by the digital divide. One of the indicators is that students are limited in using gadgets. Facing the rapid development of information and communication technology, Islamic boarding school students are faced with two dilemmas. On the one hand, the digital world demands seamless connectivity so that it is not out of date and always accesses all information, on the other hand Islamic boarding school students are required to maintain traditions and limit the use of digital devices. This paper intends to examine more deeply the opportunities and challenges of implementing digital inclusion among santri in Indonesia as an effort to overcome the digital divide among santri. Islamic boarding schools are managed for the development of educational functions, da'wah functions and community empowerment functions. The challenges faced by pesantren include internal parties, family, digital literacy, infrastructure, strengthening religious values and the technological revolution. In the end, to realize digital inclusion in Islamic boarding schools and students in Indonesia, it requires the cooperation of all parties, from kyai and students, the government, alumni, and the private sector because this is not an easy task, but it requires a mature strategy that may differ between one with another.

Keywords: Indonesia, Information Technology, Islamic Boarding School, Santri

Abstrak

Pesantren salah satu institusi pendidikan yang ikut terdampak kesenjangan digital. Salah satu indikatornya adalah para santri dibatasi dalam menggunakan gadget. Menghadapi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang demikian pesat, santri pesantren dihadapkan pada dua sisi yang dilematis. Di satu sisi dunia digital menuntut adanya konektivitas tanpa batas supaya tidak ketinggalan zaman dan senantiasa mengakses segala informasi, di sisi lain santri pesantren dituntut mempertahankan tradisi dan pembatasan penggunaan perangkat digital. Tulisan ini bermaksud menelaah lebih dalam tentang peluang dan tantangan penerapan inklusi digital di kalangan santri di Indonesia sebagai upaya mengatasi kesenjangan digital di kalangan santri. Pesantren dikelola untuk pengembangan fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Tantangan yang dihadapi oleh pesantren antara lain pihak internal, keluarga, literasi digital, infrastruktur, penguatan nilai-nilai keagamaan dan revolusi teknologi. Pada akhirnya untuk mewujudkan digital inklusi di Pesantren dan kalangan santri di Indonesia dibutuhkan kerjasama semua pihak mulai dari kyai, dan santri, pemerintah, alumni, dan pihak swasta karena ini bukanlah tugas yang semudah membalik telapak tangan tapi dibutuhkan strategi yang matang dan mungkin saja berberda antara satu dengan yang lain.

Kata Kunci: Indonesia, Pesantren, Santri, Teknologi Informasi

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), telah berdampak signifikan pada beberapa sektor utama masyarakat seperti transportasi, kesehatan, bisnis, pendidikan dan komunikasi di banyak negara maju dan berkembang di dunia. Namun, Internet telah berkembang biak secara tidak merata di seluruh dunia, menghasilkan kesenjangan digital global. Faktor-faktor kontekstual, termasuk kesenjangan perkotaan-pedesaan, kesenjangan gender, ketidaksetaraan pendapatan dan pendidikan, hambatan agama dan budaya, semuanya mendukung kesenjangan digital [1]. Implikasi dari kesenjangan digital tidak terbatas pada apakah individu memiliki atau tidak memiliki akses ke teknologi. Saat masyarakat informasi berkembang, memiliki akses dan kemampuan untuk menggunakan teknologi baru, khususnya Internet, juga berarti menjadi bagian integral dari masyarakat dan menjadi warga negara yang efektif. Orang-orang dengan akses terbatas akan dikalahkan oleh mereka yang memiliki kemampuan lebih dulu dalam memilih dan memproses informasi [2]. Untuk mengatasi kesenjangan digital di berbagai belahan dunia, lahirlah visi inklusi digital yang tertanam dalam 'Declaration of Principles' yang dipresentasikan pada KTT Dunia tentang Masyarakat Informasi, di Jenewa, 10-12 Desember 2003. Visi inklusi digital ini pada intinya menyatakan adalah bahwa setiap orang di dunia akan memiliki akses yang sama terhadap pengetahuan dan informasi yang mereka butuhkan untuk memungkinkan mereka menjalani hidup mereka secara maksimal [3].

Pesantren salah satu institusi pendidikan yang ikut terdampak kesenjangan digital. Salah satu indikatornya adalah para santri dibatasi dalam menggunakan gadget [4]. Pesantren adalah lembaga pendidikan tradisional yang minimal mengajarkan mata pelajaran agama termasuk hafalan Al-Qur'an, Tafsir Al-Qur'an, Tradisi Nabi, dan hukum Islam (fiqh). Di banyak bagian dunia, sekolah-sekolah ini disebut madrasah, meskipun istilah dalam bahasa Arab Modern dapat merujuk pada semua jenis sekolah. Di Asia Tenggara mereka disebut bermacam-macam, pondok, pondok pesantren dan pesantren [5]. Di Indonesia saat ini ada sekitar jumlah pesantren di Indonesia pada Triwulan I-2021 sebanyak 31.385 pondok pesantren dengan jumlah santri sekitar 4,29 juta orang [6].

Lukens-Bull menggambarkan perkembangan pesantren dan madrasah dalam tiga poin yang terkait dengan pembangunan. Pertama, adanya tradisi akomodasi kuno dalam dunia pendidikan Islam Indonesia. Hal ini terlihat pada mitos-mitos dasar yang digunakan pesantren tradisional untuk memahami perannya dalam masyarakat. Kedua, ada keinginan untuk memodernisasi dan memenuhi kebutuhan modern siswa dan masyarakat sambil mempertahankan akar yang kuat dalam pendidikan Islam tradisional. Ini harus menjadi proses 'evolusi' yang berkelanjutan. Ketiga, masyarakat pesantren telah menolak negara syariah, khilafah, penggunaan kekerasan, dan pemahaman yang sempit tentang bagaimana seharusnya berbangsa. Mereka telah bekerja keras untuk menjauhkan diri dari orang lain yang berusaha menutupi legitimasi mereka. Dia memprediksi bahwa pesantren dan bentuk pendidikan Islam lainnya akan memberikan kontribusi bagi masa depan Indonesia sebagai masyarakat yang plural, damai dan demokratis [7].

Saat ini, teknologi memainkan peran yang jauh lebih besar dalam kualitas dan cakupan cara kita belajar, seperti platform pembelajaran digital baru yang diperkirakan mencapai 350 miliar USD pada tahun 2025. Yermche dari perusahaan Ericson memperkirakan dengan penekanan yang semakin besar pada pemrograman, robotika, AI, dan otomatisasi, keahlian digital yang semakin menjadi prasyarat tenaga kerja masa depan. Perubahan yang terjadi saat ini menunjukkan disparitas antara negara maju dan negara berkembang. Jika Anda tidak terhubung, itu menunjukkan kepada Anda lompatan yang harus Anda lakukan antara aspek konektivitas, akses ke pendidikan dan manfaat yang didapat darinya. Menutup kesenjangan digital ini, dengan mereka yang tidak terhubung atau tidak dianggap melek digital, sangat penting untuk memastikan distribusi peluang digital yang adil di seluruh negara, lokasi, jenis kelamin, status sosial ekonomi, dan usia [8].

Menurut National Digital Inclusion Alliance (NDIA) Inklusi Digital mengacu pada kegiatan yang diperlukan untuk memastikan bahwa semua individu dan komunitas, termasuk yang paling kurang beruntung, memiliki akses dan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Ada lima elemen yang setidaknya harus dipenuhi untuk mencapai inklusi digital; 1) layanan internet broadband yang kuat dan terjangkau; 2) perangkat berkemampuan internet yang memenuhi kebutuhan pengguna; 3) akses ke pelatihan literasi digital; 4) dukungan teknis yang berkualitas; dan 5) aplikasi dan konten online yang dirancang untuk memungkinkan dan mendorong kemandirian, partisipasi, dan kolaborasi. Digital Inclusion harus berkembang seiring kemajuan teknologi. Inklusi Digital membutuhkan strategi dan investasi yang disengaja untuk mengurangi dan menghilangkan hambatan historis, kelembagaan, dan struktural untuk mengakses dan menggunakan teknologi [9].

Menghadapi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang demikian pesat, santri pesantren dihadapkan pada dua sisi yang dilematis. Di satu sisi dunia digital menuntut adanya konektivitas tanpa batas supaya tidak ketinggalan zaman dan senantiasa mengakses segala informasi, di sisi lain santri pesantren dituntut mempertahankan tradisi dan pembatasan penggunaan perangkat digital. Tulisan ini bermaksud menelaah lebih dalam tentang peluang dan tantangan penerapan inklusi digital di kalangan santri di Indonesia sebagai upaya mengatasi kesenjangan digital di kalangan santri.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Upaya memetakan kebijakan media melibatkan tiga aspek penting: (i) mengidentifikasi kebijakan; (ii) menentukan keterkaitan kebijakan-kebijakan; (iii) melakukan analisis kebijakan. Aspek-aspek ini merupakan pertimbangan utama saat mengamati susunan data sekunder yang tersedia. Data ini utamanya dikumpulkan melalui studi literatur yang diambil dari Internet menyediakan akses cepat ke portal resmi dari institusi dan organisasi yang relevan dengan penelitian ini, atau memahami konteks tertentu yang melingkupi sebuah kebijakan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peluang

Perbedaan latar belakang tentu mempengaruhi terhadap karakter orang itu sendiri. Orang Melayu berbeda dengan orang Jawa, orang Jawa berbeda dengan orang Padang dan seterusnya. Di Pesantren sini, santri akan belajar banyak sekali terkait perbedaan antarsesama penduduk Indonesia yang berada dalam teritorial yang berbeda. Sehingga, hal ini bermanfaat untuk anak di masa depannya agar memiliki sikap toleransi yang diajarkan oleh Islam dan dapat dengan mudah mengenali masyarakat yang ada di lingkungannya. Pertama, belajar bertanggung jawab. Pesantren juga mengajarkan bagaimana anak dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Bila dia bersalah, maka pondok memberikannya sanksi berupa takzir, seperti digundul, membersihkan halaman sekitar pondok, menghafal pelajaran, dan lain sebagainya. Sanksi tersebut diharapkan dapat menyadarkan bahwa perbuatan melanggar aturan itu adalah tidak baik. Tentu, akan tergambar dalam benaknya bahwa santri yang ditakzir adalah santri yang tidak baik [11].

Kedua, reformasi pendidikan pesantren dari yang dulunya tidak eksklusif menjadi inklusif. Sebagai lembaga Islam, pesantren telah memainkan beberapa peran penting dan krusial dalam situasi sejarah Indonesia yang terus berubah. Pada masa kolonial, ia mencoba mengisolasi diri dari pengaruh penjajah Eropa, non-Muslim, karena mereka percaya bahwa tradisi belajar Islam akan memupuk penguasaan ilmu-ilmu keislaman dan melalui ini umat Islam akan dapat menunaikan kewajiban agamanya dalam kehidupan sehari-hari. sejalan dengan ortodoksi Islam. Para pemimpin pesantren melihat tujuan yang berbeda dalam filosofi pendidikan penjajah yang dianggap sebagai sistem yang berorientasi duniawi. Filosofi seperti itu dianggap berbahaya bagi 'visi murni' dari tradisi belajar pesantren. Akibatnya, pendidikan pesantren merupakan blok yang kokoh terhadap pengaruh penjajah. Para pemimpin pesantren memelihara dan mengembangkan jaringan intelektual dengan pusat-pusat pembelajaran Islam di dunia berbahasa Arab melalui ziarah ke Mekah dan dengan belajar di Timur Tengah. Selama akhir abad ke-19, situasi berubah ketika pendidikan Islam tradisional di Timur Tengah tunduk pada gerakan reformasi. Reformisme ini merupakan hasil dari kritik diri terhadap keterbelakangan masyarakat Islam di seluruh dunia. Salah satu cara yang dianjurkan untuk mengatasi keterbelakangan ini dan untuk meningkatkan kemajuan umat Islam adalah bahwa Islam - dan pendidikan Islam pada khususnya - harus mengadopsi aspek-aspek gagasan Barat tentang modernitas. Hal ini mengakibatkan diadopsinya model *graded class* untuk menggantikan model *halaqah* yang sebelumnya paling populer. Hasil lain adalah penggabungan mata pelajaran non-Islam sebagai membekali siswa yang menghadapi dunia modern yang kompetitif. Reformasi ini sangat mempengaruhi pesantren di Indonesia, terbukti dengan diterapkannya model kelas berjenjang berupa sistem madrasah dan masuknya mata pelajaran non-Islam [12].

Ketiga, dukungan infrastruktur. Pemerintah Republik Indonesia membangun infrastruktur digital yang kuat dan inklusif untuk meningkatkan konektivitas telekomunikasi dalam menjembatani kesenjangan digital. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan, pemerintah memanfaatkan momentum pandemi untuk mempercepat transformasi digital. Bahkan telah menerapkan strategi untuk mengatasi kesenjangan digital melalui penguatan infrastruktur digital, pengembangan talenta digital, dan pembentukan hukum yang tepat untuk melengkapi regulasi primer. Guna pemerataan pembangunan infrastruktur di semua level, Pemerintah Republik Indonesia telah secara masif membangun infrastruktur internet di wilayah yang belum terjangkau akses internet. Selain itu, Indonesia juga menargetkan peluncuran Satelit High-Throughput Satria-1 pada tahun 2023 untuk penyediaan akses internet di seluruh titik layanan publik Indonesia yang belum tersedia akses internet. Satelit multifungsi Satria-I ini digunakan untuk melengkapi jaringan kabel serat optik yang sudah terbangun. Ini adalah salah satu misi konektivitas inklusif yang diwujudkan dalam agenda transformasi digital. Kementerian Komunikasi dan Informatika, memastikan keberlanjutan proyek-proyek tersebut salah satunya melalui implementasi Program Universal Service Obligation (USO) [13].

Keempat, dukungan kebijakan. Kebijakan pemerintah dalam mendukung inklusi digital di kalangan santri dapat dilihat dari berbagai kebijakan yang dituangkan dalam beberapa tahun terakhir. Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren memberikan rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi kepada pesantren berdasarkan kekhasannya mengakomodir perkembangan, aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat, serta menempatkan pengaturan hukumnya dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang terintegrasi dan komprehensif [14]. Sebagai wujud implementasi UU 18 Tahun 2019, Presiden Jokowi juga sudah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Pesantren. Pada pasal 3 disebutkan Pendanaan penyelenggaraan Pesantren dikelola untuk pengembangan fungsi Pesantren yang meliputi: a. fungsi pendidikan; b. fungsi dakwah; dan c. fungsi pemberdayaan masyarakat. Tiga fungsi ini

sangat mungkin dijalankan secara digital. Pada fungsi pendidikan misalnya pesantren mulai menerapkan e library untuk santri bisa membaca atau meminjam buku atau karya dari para ulama atau ahli agama yang dijadikan kurikulum di pesantren. Pada bidang dakwah, para santri dan ustadz atau kyai dapat memanfaatkan media social sebagai wadah untuk menyampaikan pesan-pesan moral sebagai wujud Islam Rahmatan lil alamin. Pada pemberdayaan masyarakat, para santri dapat memanfaatkan perangkat digital untuk membantu masyarakat sekitar mengakses layanan keuangan, transaksi bisnis baik skala mikro atau makro, dan lain-lain.

Kelima, dukungan program. Pemerintah melalui berbagai unit kementerian atau badan usaha senantiasa membuat program untuk pemberdayaan pesantren seperti bantuan pembelajaran daring yang diberikan selama 3 bulan (sebesar Rp5 juta/bulan) kepada 14.115 lembaga dan penyediaan akses internet di pesantren oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika [15]. Melalui badan usaha seperti Telkom pemerintah meluncurkan program Pesantren Go Digital. Pesantren Go Digital memberikan solusi yang lengkap mencakup digitalisasi proses belajar mengajar hingga proses bisnis lain di lingkungan pesantren. Selain itu program ini juga mendorong dan mengawal seluruh Santri untuk terus mengembangkan keahlian digital sesuai dengan kompetensi sehingga dapat bersaing di era revolusi industri. Sehingga dengan adanya digitalisasi pesantren dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menyiapkan talenta digital dari Pesantren. di Pesantren Go Digital pesantren mendapatkan fasilitas website gratis dan juga diberikan literasi digital dari mulai belajar keahlian dan pengembangan bisnis, e commerce, komunitas hingga dakwah digital untuk pesantren dan santri [16]. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, meluncurkan program “Santri Digitalpreneur Indonesia.” Santri Digitalpreneur Indonesia merupakan program pelatihan dan pendampingan bagi para santri dalam rangka pengembangan ekosistem ekonomi kreatif dengan melibatkan para pelaku industri sebagai mentor pembimbing. Kegiatan ini difokuskan pada lingkup ekonomi kreatif yang berfokus pada pengembangan konten digital dan pengelolaan Intellectual Property secara komprehensif sehingga bisa menghasilkan nilai tambah secara maksimal [17].

Keenam, Dukungan alumni. Tidak angka pasti jumlah alumni pesantren saat ini, namun demikian diperkirakan jumlahnya sudah jutaan mengingat sejarah dan tradisi pesantren yang sudah lama hadir di Indonesia. Dukungan alumni pesantren seperti Muhaimin Iskandar (Gus AMI) dalam memperjuangkan kepentingan pesantren terkhusus para kyai dan santri dalam era digital patut diapresiasi. Perjuangan untuk disahkannya Undang-Undang Pesantren melalui PKB yang dipimpinnnya [18] ditambah dengan perjuangan untuk munculnya Peraturan Ppresiden tentang Pendanaan Pesantren [19] sedikit banyak tentulah ada peran dari seorang Muhaimin Iskandar. Di samping itu Gus AMI juga meluncurkan platform digital untuk para santri dan masyarakat yakni Santri Net sebagai wujud kecintaannya kepada para santri [20]. Berkat komitmen perjuangannya itu tidak salah jika Gus AMI didaulat menjadi Panglima Santri karena dianggap konsen perjuangannya adalah santri dan pesantren [21]. Gus AMI mengaku masih banyak santri yang tertinggal dan belum mendapatkan akses kemajuan. Karena itu, pemerintah diharapkan untuk memfasilitasi kaum santri agar mereka tumbuh menjadi wirausahawan handal. Indonesia akan maju jika banyak pengusaha yang handal [22]. Tentu kita berharap jutaan alumni pondok pesantren di Indonesia dapat menjadi teladan dalam memperjuangkan kepentingan santri dan pesantren sesuai dengan peran dan porsinya masing-masing karena memang pesantren dan santri membutuhkan perhatian saat ini dan masa yang akan datang.

3.2 Tantangan

Berkaitan dengan upaya untuk menciptakan inklusi digital di kalangan santri di Indonesia paling tidak ada beberapa tantangan yang mesti dicarikan jalan keluarnya oleh semua pihak terkait dengan pesantren terkhusus para santri. Beberapa tantangan itu antara lain:

Pertama, dari dalam atau internal pesantren. Santri di pesantren tradisional selalu dipersalahkan karena ketidakmampuan mereka menangani dampak negatif media digital (khususnya Internet). Akibatnya, ada aturan ketat yang membatasi bahkan melarang keras penggunaan internet bagi santri di Pesantren semacam itu. pendidikan Meskipun pendidikan agama telah berubah dari diskusi tatap muka dengan ulama menjadi interaksi online yang dimediasi yang disebabkan oleh tiga faktor: kemudahan dan keterjangkauan media religi online, efisiensi biaya dan waktu yang melekat pada media online, dan keragaman dan kelengkapan media digital yang tersedia [23]. Di era modern, dinamika di Indonesia menghadapi situasi problematik: tekanan dan modernisasi sistem pendidikan. Di satu sisi, situasi seperti itu memaksa pesantren untuk mengambil langkah ekstra hati-hati agar terlihat kurang gesit dalam mereformasi sistem pendidikan dan kelembagaannya dalam rangka pemenuhan fungsi tradisionalnya. Di sisi lain, tradisi ilmu keislaman yang dikembangkan dianggap sangat dekat dengan kecenderungan sufistik-juristik yang dimiliki mazhab non-puritan. Seiring penetrasi modernisasi dalam sistem pendidikan nasional secara bertahap diterima, pola dialektikanya telah mendorong pesantren untuk melakukan proses konvergensi yang menjadikan lembaga ini bersaing sebagai lembaga pendidikan dan sekaligus penyelenggara pendidikan [24]

Kedua, tantangan dari keluarga. Di Indonesia, teknologi media, khususnya media online, seringkali menjadi perhatian yang signifikan. Dunia online sering dikaitkan dengan dekadensi, konsumerisme, dan moral yang longgar. Orang tua, misalnya, terus-menerus menyampaikan kekhawatiran terkait kemungkinan anak-

anak mereka terpapar situs web yang tidak pantas dan materi terkait yang tidak sesuai. Sebaliknya, Internet juga telah digunakan oleh umat Islam di Indonesia untuk meningkatkan praktik keagamaan mereka dan melakukan dakwah (proselytisation). Internet, pada gilirannya, berkontribusi pada penyebaran beragam interpretasi Islam, termasuk pemahaman Islam yang eksklusif dan konservatif [25]. Kelompok Muslim paling ekstrim juga menggunakan Internet untuk menyerukan jihad melawan orang-orang kafir. Kehadiran gerakan dakwah online dapat dikatakan sebagai reaksi terhadap kedua tren: pornografi siber dan propaganda teroris, termasuk propaganda kebencian. Gerakan-gerakan dakwah ini tentu lebih aktif memposisikan diri sebagai penjaga moral yang berupaya untuk memperkenalkan moralitas Islam dan memerangi kerusakan moral [25]. Di Indonesia, teknologi seluler telah hadir di akhir 35 tahun rezim Suharto, dan setelahnya era keterbukaan baru. Tidak mengherankan jika ponsel oleh banyak orang Indonesia dikaitkan dengan kebebasan baru pada periode pasca 1998 ini, memfasilitasi munculnya budaya anak muda yang baru, gaya hidup mobile yang trendi, serta eksperimen dengan identitas seksual baru [26].

Ketiga, Literasi Digital. Teknologi dan perkembangan baru di media mengubah cara individu, kelompok, dan masyarakat berkomunikasi, belajar, bekerja, dan memerintah. Realitas sosio-teknis baru ini menuntut peserta untuk tidak hanya memiliki keterampilan dan kemampuan yang terkait dengan penggunaan alat-alat teknologi, tetapi juga pengetahuan tentang norma dan praktik penggunaan yang tepat [27]. Ketika Gilster pertama kali membuat dunia sadar akan konsep 'literasi digital' pada akhir 1990-an, ia mendefinisikannya dalam istilah pendidikan, mengakui keunikan fundamental namun revolusioner dari internet dan mengidentifikasi siswa yang melek digital memiliki perangkat khusus. Keterampilan informasi (misalnya, evaluasi, pencarian) diterapkan pada teks dan informasi multimedia yang ditemukan di internet dan ditempatkan dalam konteks pembelajaran formal berbasis sekolah. Dengan akses secepat kilat ke sejumlah ide dan informasi yang tampaknya tak terbatas, katanya, muncul tanggung jawab baru bagi pengguna. Bahkan dalam konseptualisasi paling awal, jelas bahwa literasi digital jauh melampaui keterampilan literasi dasar membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara. Dengan media dan teknologi digital saat ini, orang kini juga dapat berkreasi, bekerja, berbagi, bersosialisasi, meneliti, bermain, berkolaborasi, berkomunikasi, dan belajar. Dengan munculnya alat Web 2.0, budaya partisipatif telah muncul, yang membutuhkan keterampilan untuk mengekspresikan, menciptakan, berbagi, berinteraksi dan terlibat – kegiatan yang jauh melampaui visi awal Gilster tentang literasi digital. Definisi istilah sekarang berkisar dari sekadar menjadi fasih teknologi hingga kemampuan untuk menerapkan keterampilan literasi informasi (misalnya, menemukan, mengekstraksi, mengorganisir, mengelola, menyajikan, dan mengevaluasi informasi) di lingkungan digital hingga kerangka kerja konseptual yang lebih luas dan lebih kompleks yang mencakup berbagai keterampilan, pemahaman, norma, dan praktik [27].

Keempat, Infrastruktur. Meski pemerintah berkomitmen membangun infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di berbagai wilayah di Indonesia, namun harus diakui bahwa sebagian besar pesantren masih mengalami kendala dalam mengakses internet. Dalam catatan Lembaga Analisa dan Kebijakan Publik (LANSKAP) Indonesia sebagian kualitas jaringan akses internet yang dimiliki oleh pondok pesantren tidak stabil atau bahkan mati [28]. Data Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Pendis) Kementerian Agama menunjukkan belasan ribu madrasah belum teraliri listrik dan belum memiliki akses internet. Kebanyakan madrasah-madrasah minim akses tersebut ternyata berada di Pulau Jawa. Daerah terbanyak dengan madrasah tak berlistrik adalah Jawa Timur (2.945 madrasah), kemudian Jawa Barat (2.522), Jawa Tengah (870), serta Banten (592). Madrasah tak dialiri listrik juga mencapai 272 unit di DKI Jakarta. Meski secara proporsional, jumlah madrasah memang paling banyak terdapat di Jawa Timur (20.293 madrasah) kemudian Jawa Barat (15.641) dan Jawa Tengah (11.307). Selain di Jawa, tak ada satupun daerah di Tanah Air tanpa madrasah yang belum dialiri listrik. Paling sedikit di Bali (8 madrasah) dan terbanyak di luar Jawa adalah Sumatra Utara (803). Secara total, jumlah madrasah yang belum dialiri listrik mencapai 11.998 unit. Kondisi rawan listrik tersebut berkebalikan dengan data rasio elektrifikasi yang dilansir Kementerian ESDM. Rasio elektrifikasi di masing-masing provinsi di Pulau Jawa itu dicatatkan seluruhnya 99,99 persen, terkecuali di Jawa Tengah yang mencapai 99,97 persen. Selain ketiadaan listrik, madrasah-madrasah di Pulau Jawa juga paling banyak belum memiliki akses internet. Perinciannya, 3.193 di Jawa Timur, 2.684 di Jawa Barat, 1.039 di Jawa Tengah. Selain itu, ada 637 di Banten, 272 di DKI Jakarta, dan 83 di DI Yogyakarta. Di luar Jawa, terbanyak di Sumatra Utara (870 madrasah), NTB (516), Sulawesi Selatan (511), dan Riau (475). Secara total, jumlah madrasah yang tak memiliki akses internet mencapai 13.793 unit. Sedangkan yang kurang lancar akses internetnya mencapai 622 madrasah. Seperti dengan aliran listrik, cakupan sinyal seluler untuk mengakses internet juga sedianya paling tinggi di Indonesia. Statistik Telekomunikasi yang dilansir Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, sejak 2017 cakupan sinyal di seluruh wilayah Jawa-Bali melampaui 99 persen wilayah [29].

Kelima, Penguatan Ilmu Agama yang tidak terdoda dengan paham transnasional. Para santri perlu didorong untuk bersikap skeptis terhadap semua informasi dalam aktivitas digitalnya. Paham agama yang baik dan benar perlu ditingkatkan guna mengantisipasi masuknya paham-paham transnasional yang selama ini mendistorsi keutuhan Indonesia sebagai sebuah bangsa. Paham transnasional yang menolak keberagaman, menyatakan bahwa memusuhi orang yang berbeda paham dan keyakinan adalah bagian dari jihad menjadi tantangan tersendiri dalam rangka menuju inklusi digital. Media sosial (cyber) menjadi pilihan utama bagi

generasi milenial dalam pencarian informasi yang bersifat instan, sehingga mereka mudah terpapar konten radikalisme. Pada dasarnya, radikalisme bukanlah penampilan fisik yang dilihat dari pemakaian jilbab besar bagi perempuan dan pemakaian celana cingkrang bagi laki-laki. Namun, lebih kepada pemahaman ideologi atau keyakinan seseorang dalam menyikapi perbedaan. Tak heran apabila perbedaan ini di latar belakang oleh ketidakpuasan terhadap pemerintah, faktor ekonomi, agama, dan lainnya, sehingga mendorong kelompok ini untuk menegakkan negara Islam [30].

Keenam, revolusi teknologi informasi saat ini telah memunculkan otoritas baru, khususnya melalui media seperti Facebook, Instagram, YouTube, dan Twitter, telah memicu perubahan tersebut. Konstruksi dan desentralisasi otoritas keagamaan dalam Islam. Santri dan da'i baru muncul dari sistem pendidikan agama nonkonvensional. Mereka tidak hanya menantang otoritas tradisional, tetapi juga mendefinisikan kembali dan mengkonseptualisasikan kembali terminologi agama lama, seperti hijrah dan wasatiyya Ahmad Nuril Huda menggambarkan munculnya kebangkitan santri sinematik yang luar biasa di Indonesia. Banyak sekali santri yang menggunakan sinematik dalam membangun wujud baru otoritas islam tradisional yg dimediasi lewat budaya virtual. Peran santri dalam sinematik ini sekaligus melawan pendahulu mereka atau konstruksi tradisional yang sudah lama dilembagakan. Kemampuan santri dalam mengelola audio visual jadi peralihan sikap santri baru [31]. Oleh karena itu diperlukan santri yang memiliki konsentrasi tidak hanya dalam tradisi ilmu agama, tapi juga melawan paham-paham agama yang selama ini bersileweran di media sosial untuk mengurangi bahkan mengikis habis penyiaran atau penyebaran pesan-pesan negatif yang tak jarang bernada kebencian dan destruktif. Pada akhirnya untuk mewujudkan digital inklusi di Pesantren dan kalangan santri di Indonesia dibutuhkan kerjasama semua pihak mulai dari kyai, dan santri, pemerintah, alumni, dan pihak swasta karena ini bukanlah tugas yang semudah membalik telapak tangan tapi dibutuhkan strategi yang matang dan mungkin saja berberda antara satu dengan yang lain.

4. KESIMPULAN

Tantangan yang dihadapi oleh pesantren antara lain pihak internal, keluarga, literasi digital, infrastruktur, penguatan nilai-nilai keagamaan dan revolusi teknologi. Pada akhirnya untuk mewujudkan digital inklusi di Pesantren dan kalangan santri di Indonesia dibutuhkan kerjasama semua pihak mulai dari kyai, dan santri, pemerintah, alumni, dan pihak swasta karena ini bukanlah tugas yang semudah membalik telapak tangan tapi dibutuhkan strategi yang matang dan mungkin saja berberda antara satu dengan yang lain.

REFERENSI

- [1] S. Jamil, "From digital divide to digital inclusion: Challenges for wide-ranging digitalization in Pakistan," *Telecommun. Policy*, vol. 45, no. 8, p. 102206, Sep. 2021, doi: 10.1016/j.telpol.2021.102206.
- [2] W. Fung Y. C. ., J. Y. C. Law, C. K. Lam, J. Y. C. Lam, and L. V, "Tackling the Digital Divide," *Br. J. Soc. Work*, vol. 4, 2009.
- [3] "WSIS: Declaration of Principles," 2003. <https://www.itu.int/net/wsis/docs/geneva/official/dop.html> (accessed Oct. 20, 2021).
- [4] I. Fakiha, "PEMBERDAYAAN SANTRI DALAM MENGHADAPI ERA DIGITAL (Studi Kasus di Pondok Pesantren Sunan Drajat Lamongan)," masters, Universitas Muhammadiyah Malang, 2021. Accessed: Oct. 20, 2021. [Online]. Available: <https://eprints.umm.ac.id/74767/>
- [5] R. Lukens-Bull, "MADRASA BY ANY OTHER NAME: Pondok, Pesantren, and Islamic Schools in Indonesia and Larger Southeast Asian Region," *J. Indones. ISLAM*, vol. 4, no. 1, Art. no. 1, Jun. 2010, doi: 10.15642/JIIS.2010.4.1.1-21.
- [6] F. Pebrianto, "Airlangga Bidik Potensi Ekonomi Syariah 31 Ribu Pesantren - Bisnis Tempo.co," 2021. <https://bisnis.tempo.co/read/1471993/airlangga-bidik-potensi-ekonomi-syariah-31-ribu-pesantren> (accessed Oct. 19, 2021).
- [7] R. Lukens-Bull, "Pesantren, Madrasa and the Future of Islamic Education in Indonesia," *Kawalu J. Local Cult.*, vol. 6, no. 1, Art. no. 1, Jun. 2019, doi: 10.32678/kawalu.v6i1.2044.
- [8] Z. Yermiche, "Digital inclusion: Equal education in digital age," Nov. 20, 2020. <https://www.ericsson.com/en/blog/2020/11/digital-inclusion-access-to-education> (accessed Oct. 20, 2021).
- [9] NDIA, "Digital Inclusion Definitions," National Digital Inclusion Alliance, 2020. <https://www.digitalinclusion.org/definitions/> (accessed Oct. 20, 2021).
- [10] P. Nilan, "The 'spirit of education' in Indonesian Pesantren," *Br. J. Sociol. Educ.*, vol. 30, no. 2, pp. 219–232, Mar. 2009, doi: 10.1080/01425690802700321.
- [11] Ebo, "Rahasia Banyak Alumni Pesantren yang Sukses," <https://opop.jatimprov.go.id/>, 2021. <https://opop.jatimprov.go.id/detail/171/5-rahasia-banyak-alumni-pesantren-yang-sukses> (accessed Oct. 20, 2021).
- [12] M. F. Isbah, "Pesantren in the Changing Indonesian Context: History and Current Developments," *QIIS Qudus Int. J. Islam. Stud.*, vol. 8, no. 1, Art. no. 1, Jun. 2020, doi: 10.21043/qiis.v8i1.5629.

- [13] F. Setu, "Siaran Pers No. 268/HM/KOMINFO/08/2021 tentang Atasi Kesenjangan Digital, Menkominfo Dorong Transformasi Digital Inklusif," Website Resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, 2021.
- [14] A. Zayadi, "UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Untuk Siapa?," 2019. <https://diy.kemenag.go.id/2772-uu-nomor-18-tahun-2019-tentang-pesantren-untuk-siapa.html> (accessed Oct. 20, 2021).
- [15] R. Puspasari, "Pemerintah Alokasikan Rp2,6 Triliun untuk Program PEN Pesantren," 2020. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-pemerintah-alokasikan-rp2-6-triliun-untuk-program-pen-pesantren/> (accessed Oct. 20, 2021).
- [16] "Pesantren Go Digital," Pesantren Go Digital, 2021. <https://pesantrengodigital.id/> (accessed Oct. 20, 2021).
- [17] C. Rukendi, "Siaran Pers: Menparekraf Luncurkan Santripreneur Dorong Santri Jadi Wirausaha Digital Demi Indonesia Bangkit," PEDULI COVID19 | KEMENPAREKRAF / BAPAREKRAF RI, Sep. 14, 2021. <https://pedulicovid19.kememparekraf.go.id/siaran-pers-menparekraf-luncurkan-santripreneur-dorong-santri-jadi-wirausaha-digital-demi-indonesia-bangkit/> (accessed Oct. 20, 2021).
- [18] pkb.id, "Cak Imin Pastikan PKB Terus Berkomitmen Kawal RUU Pesantren," DPP PKB, 2018. <https://www.pkb.id/read/9507/cak-imin-pastikan-pkb-terus-berkomitmen-kawal-ruu-pesantren/> (accessed Oct. 20, 2021).
- [19] S. Mashabi, "Ketum PKB Harap Jokowi Tindak Lanjuti UU Pesantren lewat Perpres," 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/08/13390871/ketum-pkb-harap-jokowi-tindak-lanjuti-uu-pesantren-lewat-perpres> (accessed Oct. 20, 2021).
- [20] D. Fibrianto, "Muhaimin Iskandar Luncurkan Santri Net di Peringatan Hari Santri 2020," beritasatu.com, 2020. <https://www.beritasatu.com/nasional/690407/muhaimin-iskandar-luncurkan-santri-net-di-peringatan-hari-santri-2020> (accessed Oct. 20, 2021).
- [21] Y. Mulyono, "Cak Imin Dijadikan Panglima Santri Indonesia," 2017. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3713892/cak-imin-dijadikan-panglima-santri-indonesia> (accessed Oct. 20, 2021).
- [22] pkb.id, "Suara Santri Ikut Warnai Masa Depan Indonesia," DPP PKB, 2018. <https://www.pkb.id/read/9487/suara-santri-ikut-warnai-masa-depan-indonesia/> (accessed Oct. 20, 2021).
- [23] M. Pabbajah, H. Jubba, I. Abdullah, M. T. H. Pabbajah, and Juhansar, "From the scriptural to the virtual: Indonesian engineering students responses to the digitalization of Islamic education," *Teach. Theol. Relig.*, vol. 24, no. 2, pp. 122–130, Jun. 2021, doi: 10.1111/teth.12581.
- [24] M. Arif, S. Fatonah, and A. B. F. Mb, "THE DYNAMIC SURVIVAL OF PESANTREN IN INDONESIA A BRIEF EXPLANATION FOR DEVELOPMENT OF THE TRADITIONAL MUSLIM EDUCATION," *Sunan Kalijaga Int. J. Islam. Educ. Res.*, vol. 4, no. 1, Art. no. 1, Dec. 2020.
- [25] E. F. Nisa, "Social media and the birth of an Islamic social movement: ODOJ (One Day One Juz) in contemporary Indonesia," *Indones. Malay World*, vol. 46, no. 134, pp. 24–43, Jan. 2018, doi: 10.1080/13639811.2017.1416758.
- [26] B. Barendregt, "Sex, Cannibals, and the Language of Cool: Indonesian Tales of the Phone and Modernity," *Inf. Soc.*, vol. 24, no. 3, pp. 160–170, May 2008, doi: 10.1080/01972240802020044.
- [27] E. M. Meyers, I. Erickson, and R. V. Small, "Digital literacy and informal learning environments: an introduction," *Learn. Media Technol.*, vol. 38, no. 4, pp. 355–367, Dec. 2013, doi: 10.1080/17439884.2013.783597.
- [28] LANSKAPINDONESIA, "Mencari Model Pembelajaran Jarak Jauh untuk Pondok Pesantren di Indonesia (sebuah Pilot dari LANSKAP Indonesia dan BAKTI-Kominfo RI)," LANSKAP Indonesia, Sep. 09, 2020. <https://lanskapindonesia.co/2020/09/09/mencari-model-pembelajaran-jarak-jauh-untuk-pondok-pesantren-di-indonesia-sebuah-pilot-dari-lanskap-indonesia-dan-bakti-kominfo-ri/> (accessed Oct. 20, 2021).
- [29] Z. Oktaviani, "Ironi Ribuan Madrasah tak Berlistrik di Pulau Jawa," *Republika Online*, Jul. 09, 2020. <https://republika.co.id/share/qd5of6393> (accessed Oct. 20, 2021).
- [30] M. N. Fanindy and S. Mupida, "Pergeseran Literasi pada Generasi Milenial Akibat Penyebaran Radikalisme di Media Sosial," vol. 20, p. 28, 2021.
- [31] A. N. Burhani, *The new santri: challenges to traditional religious authority in Indonesia*. Singapore: ISEAS, 2020.
- [32] M. M. Solichin, "Interrelation Kiai Authorities, Curriculum and Learning Culture in Pesantren Indonesia," *TARBIYA J. Educ. Muslim Soc.*, vol. 5, no. 1, Art. no. 1, 2018, doi: 10.15408/tjems.v5i1.7781.
- [33] A. Mujib, Y. Yunita, and S. Bachri, "The Roles of Pesantren and Madrasah in Modern Society," *AJMIE Alhikam J. Multidiscip. Islam. Educ.*, vol. 2, no. 1, Art. no. 1, Jun. 2021, doi: 10.32478/ajmie.v2i1.701.